

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG, SMART GOVERNANCE, DAN DISKOMINFO KOTA BANDUNG

Pada BAB II ini, peneliti akan membahas berkenaan objek penelitian yakni Kota Bandung dan Diskominfo Kota Bandung, yang mana Diskominfo Kota Bandung ini merupakan salah satu instansi yang memfasilitasi keberadaan *smart city* termasuk *smart governance* di Kota Bandung.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kota Bandung

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Bandung

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang ada di wilayah Jawa Barat yang secara administratif sudah berdiri sejak 28 September 1810. Batas-batas geografis Kota Bandung terletak di antara Kabupaten Bandung dan Bandung Barat dalam batas utara wilayahnya, Kabupaten Bandung di batas selatan wilayahnya, Kota Cimahi di batas barat wilayahnya, dan Kabupaten Bandung di batas timur wilayahnya. Secara astronomisnya, Kota Bandung terletak di antara 107 derajat 36' Bujur Timur dan 6 derajat 55' Lintang Selatan.

Secara luas daerahnya, Kota Bandung memiliki luas 16.729,65 hektare. Perhitungan luas tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan hasil dari tindak lanjut dari peraturan sebelumnya yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Kota Bandung adalah kawasan yang cukup padat yang didiami oleh 30 kecamatan dan 151 kelurahan yang tersebar. Sebagaimana data dari BPS Kota Bandung berikut ini:

Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Bandung		
	2020	2021	2022
Kota Bandung	151	151	151
Bandung Kulon	8	8	8
Babakan Ciparay	6	6	6
Bojongloa Kaler	5	5	5
Bojongloa Kidul	6	6	6
Astana Anyar	6	6	6
Regol	7	7	7
Lengkong	7	7	7
Bandung Kidul	4	4	4
Buah Batu	4	4	4
Rancasari	4	4	4
Gedebage	4	4	4
Cibiru	4	4	4
Panyileukan	4	4	4
Ujung Berung	5	5	5
Cinambo	4	4	4
Arcamanik	4	4	4
Antapani	4	4	4
Mandalajati	4	4	4
Kiaracandong	6	6	6
Batununggal	8	8	8
Sumur Bandung	4	4	4
Andir	6	6	6
Cicendo	6	6	6
Bandung Wetan	3	3	3
Cibeunying Kidul	6	6	6

Cibeunying Kaler	4	4	4
Coblong	6	6	6
Sukajadi	5	5	5
Sukasari	4	4	4
Cidadap	3	3	3

Tabel 2.1.1.1. 1 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan Kota Bandung 2020-2022

Saat ini, Kota Bandung disebut sebagai Kota Metropolitan mengapa dikatakan demikian karena Kota Bandung merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia yang juga membuat Kota Bandung sendiri menjadi ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, Kota Bandung juga masuk kategori Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung (Metropolitan Cekungan Bandung) atau yang bisa disebut sebagai kawasan metropolitan terbesar di Indonesia kedua setelah posisi Metropolitan Jabodetabek punjur. Mengapa disebut sebagai kota kedua terbesar dalam kategori metropolitan dikarenakan jalur di Kota Bandung secara utamanya terhubung di dalam ruas Tol Purbaleunyi dan Kereta Argo Parahyangan yang memudahkan mobilitas antara Bandung.

Apabila merujuk kepada Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, ada beberapa dasar dalam pembangunan struktur tata ruang Kota Bandung.

1. Kota Bandung fokus berkembang di dua aspek utama yaitu Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang terdiri atas Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.

2. Kota Bandung juga membagi wilayah kotanya menjadi enam wilayah pengembangan dengan masing-masing dilayani oleh satu pusat sekunder. Yaitu: Setrasari yang melayani WP Bojonegara; Sadang Serang yang melayani WP Cibeunying; Kopo Kencana yang melayani WP Tegalega, Turangga yang melayani WP Karees; Arcamanik yang melayani WP Ujungberung; dan Margasari yang melayani WP Gedebage.

Dalam penggunaan lahannya, Kota Bandung memiliki dua kawasan utama di perkotaan yang terdiri atas Kawasan Lindung yang fokus pembangunannya ada kawasan perlindungan atau cagar budaya, serta Kawasan Budidaya yang berfokus kepada pembangunan kawasan permukiman. Hal tersebut juga menandakan bahwa masyarakat Kota Bandung memang memiliki penduduk yang cukup padat sehingga Pemerintah Kota Bandung sendiri berfokus pada pembangunan permukimannya.

2.1.2. Kondisi Demografi Kota Bandung

Berbicara mengenai perkembangan demografi di Kota Bandung, menurut data BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, berdasarkan dengan hasil sensus pada 2021 lalu Kota Bandung memiliki penduduk sebanyak 2.527.854 jiwa yang mana apabila dibandingkan dengan hasil sensus per 2020, Kota Bandung mengalami pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,84. Dari hasil tersebut juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun yang sama yaitu 2022 mencatat bahwa Kota

Bandung menjadi wilayah terpadat di Provinsi Jawa Barat dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 15,17 ribu jiwa per kilometer persegi.

Persebaran penduduk di Kota Bandung menumpuk di daerah Kecamatan Babakan Ciparay yang mana hampir 6% dari total penduduk Kota Bandung bermukim di daerah tersebut. Kemudian kondisi tersebut diikuti oleh Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Bojong Kaler, Kecamatan Batununggal dan Kecamatan Coblong. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki paling sedikit penduduk yaitu ada di Kecamatan Cinambo, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Gedebage, dan Kecamatan Panyileukan. Untuk kondisi kecamatan paling padat di Kota Bandung sampai saat ini masih diduduki oleh Kecamatan Bojongloa Kaler yang memiliki tingkat kepadatan mencapai 39.337 jiwa per kilometer persegi yang diikuti oleh Andir dan Astana Anyar.

Meski pun persebaran penduduk di Kota Bandung sangat padat, tetapi BPS Kota Bandung mengatakan bahwa persebaran di 2020 sampai saat ini tingkat kepadatannya itu semakin merata apabila dibandingkan dengan kurun satu dekade ke belakang. Kepadatan penduduk ini pun menurut BPS Kota Bandung dapat dilihat dan dianalisis berdasarkan struktur umurnya dikarenakan dari adanya struktur umur yang ada, sektor publik pun dapat melihat secara jelas akan risiko serta kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada masing-masing kelompok umur yang ada.

Sebagai contohnya, dari struktur usia yang ada per 2020 lalu, Kota Bandung memiliki kelompok usia yang mayoritas berasal dari kelompok awal usia kerja (20-29 tahun) juga usia pendidikan (15-19 tahun). Yang mana dari kelompok tersebut juga dapat dilihat ke arah mana Kota Bandung harus memberikan pelayanan yang berlebih, dikarenakan kelompok tersebut merupakan modal dasar dari pembangunan sehingga penyediaan sarana dan prasarana pun harus dipersiapkan.

2.1.3. Kondisi Ekonomi Kota Bandung

Perekonomian di Kota Bandung merupakan salah satu sektor pendukung kemajuan di Kota Bandung dalam pembangunan perkotaannya. Kemajuan sektor ekonomi ini dipengaruhi oleh banyaknya lapangan usaha di Kota Bandung yang mana menurut BPS Kota Bandung, pada Tahun 2022 itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha sebesar 211,25 triliun rupiah dan apabila dilihat persentasenya yaitu sebesar 13,94 dari total PDRB Kota Bandung 2022. Kemudian untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung Atas Harga Berlaku sebesar 328,32 triliun rupiah. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung naik sebesar 5,41 dibandingkan dengan tahun 2020.

Dari adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di tahun 2022, masyarakat Kota Bandung melalui survei Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) yang diadakan oleh Diskominfo Kota

Bandung menunjukkan 44,9% dari warga Kota Bandung menilai bahwa kondisi ekonomi pada 2022 secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian 43,1% di antaranya menilai lebih baik.

2.1.4. Kondisi Eksisting Sosial Kota Bandung

Berbicara mengenai kondisi sosial di Kota Bandung sendiri, seperti pada perkotaan besar pada umumnya, kondisi yang ada di sini dipengaruhi oleh padatnya penduduk di perkotaan yang sering kali melahirkan permasalahan sosial yang paling umum yaitu berupa kemacetan. Hal ini dipengaruhi juga oleh adanya daya tarik pada sektor pariwisata yang sering kali mendatangkan warga non lokal ke wilayah Kota Bandung yang menyebabkan mobilitas di Kota Bandung menjadi semakin padat. Dari adanya kepadatan tersebut juga melahirkan permasalahan perkotaan lainnya yaitu tentang permasalahan sampah dan yang ketiga soal kompetisi lapangan pekerjaan di Kota Bandung yang sangat sulit. Seluruh permasalahan sosial tersebut disebutkan di dalam survei Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bandung yang diadakan oleh Diskominfo Kota Bandung pada 2019 lalu.

Meski pun permasalahan sosial di Kota Bandung sangatlah kompleks, Pemerintah Kota Bandung telah berupaya untuk bisa menguraikan permasalahan tersebut melalui inovasi-inovasi yang ada, yaitu salah satunya dengan diadakannya projek *Bandung Smart City*, yang masing-masing memiliki dimensi dan peran masing-masing sesuai dengan

kondisi sosial di perkotaan yang nantinya terhubung satu sama lain di dalam konsep *smart city* yang dijalankan.

2.2. Smart Governance di Kota Bandung

Perkembangan teknologi merujuk pada World Bank (2016) akan menyebar dengan cepat dan juga akan mendorong pertumbuhan, memperluas kesempatan, dan juga meningkatkan penyampaian sebuah layanan. Setiap perkotaan memiliki caranya masing-masing untuk bisa meningkatkan pelayanan publiknya melalui inovasi-inovasinya tergantung dengan kondisi masing-masing wilayah. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang berupaya untuk bisa menguraikan permasalahan perkotaannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang nantinya akan muncul konsep *smart city*. Konsep *smart city* atau kota cerdas merupakan pendekatan yang *modern* dan *fashionable* di masa kini untuk bisa meningkatkan kualitas hidup di perkotaan dengan mengupayakan kemajuan teknologi yang difasilitasi oleh pemerintah daerahnya.

Kota Bandung sebagai salah satu kota yang sudah menjalankan *smart city* dari 2014 lalu di bawah masa pemerintahan Ridwan Kamil yang pada saat itu masih menjadi Wali Kota, meneruskan keberjalanan *smart city* sebagai salah satu upaya untuk mengelola kota menjadi lebih baik hingga saat ini. Konsep *smart city* yang paling krusial yang dijalankan oleh Kota Bandung saat ini adalah berasal dari dimensi *smart governance* atau tata kelola pemerintahan secara cerdas yang berupaya untuk mewujudkan misi Kota Bandung untuk bisa menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani (Portal Bandung, 2017).

Penerapan *smart governance* di Kota Bandung mengacu kepada tiga poin besar (Putra, 2019), pertama diawali oleh adanya peluncuran *website* resmi milik Pemerintah Kota Bandung yang diintegrasikan dengan seluruh OPD yang ada di Kota Bandung agar bisa diakses oleh publik, kemudian meluncurkan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pemerintah terkait penerapan *smart governance*, serta portal satu atap yaitu *Open Data Bandung* sebagai sumber informasi publik perihal data terbuka milik Kota Bandung.

2.3. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Bandung)

Secara kedudukannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung terletak di Jalan Wastukencana Nomor 2, Kota Bandung. Struktur organisasi Pemerintahan Kota Bandung tersusun sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung atau yang lebih dikenal sebagai Diskominfo adalah lembaga pemerintahan yang ada di bawah naungan Pemerintah Kota Bandung. Pada awalnya sebelum disebut sebagai Diskominfo, dinas ini dinamai sebagai Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang disingkat sebagai Bakominfo atau lembaga teknis daerah yang dibentuk pada 4 Desember 2007 oleh pemerintah dengan dasar adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Dinas Daerah Kota Bandung. Dengan adanya aturan tersebut, maka ada dua lembaga yang digabungkan yaitu antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi serta Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Kemudian, Bakominfo ini pun memiliki perubahan nama menjadi Diskominfo Kota Bandung setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang disahkan pada 7 Agustus 2009.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki tugas untuk bisa melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika, dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Ada pun fungsi Diskominfo di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, dan hubungan masyarakat.
2. Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika, dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat.
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ada pun visi juga misi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yaitu dengan visi Terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi

dari informatika penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat. Selain itu, terdapat juga misi yang dimiliki sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis.
3. Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kerjasama, kemitraan, dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
5. Mendorong peran dan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab.
6. Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang handal.

Kedudukan atau struktur organisasi Dinas Komunikasi Kota Bandung diatur di dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kota Bandung. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung di dalam Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.